



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARIF WIBOWO
2. Jabatan : KETUA PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI PROTEKSI TANAMAN
3. NHK : 972317

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 6.869.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m²/110 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
2. Tanah Seluas 108 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
3. Tanah Seluas 200 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 129 m²/90 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 862 m²/100 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 3.879.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 148 m²/100 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 197.000.000

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOBIL, TOYOTA SEDAN Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
3. MOBIL, NISSAN MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000



4. MOTOR, HONDA SUPRA FIT Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp.
2.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	9.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	543.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	7.618.000.000
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	7.618.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.